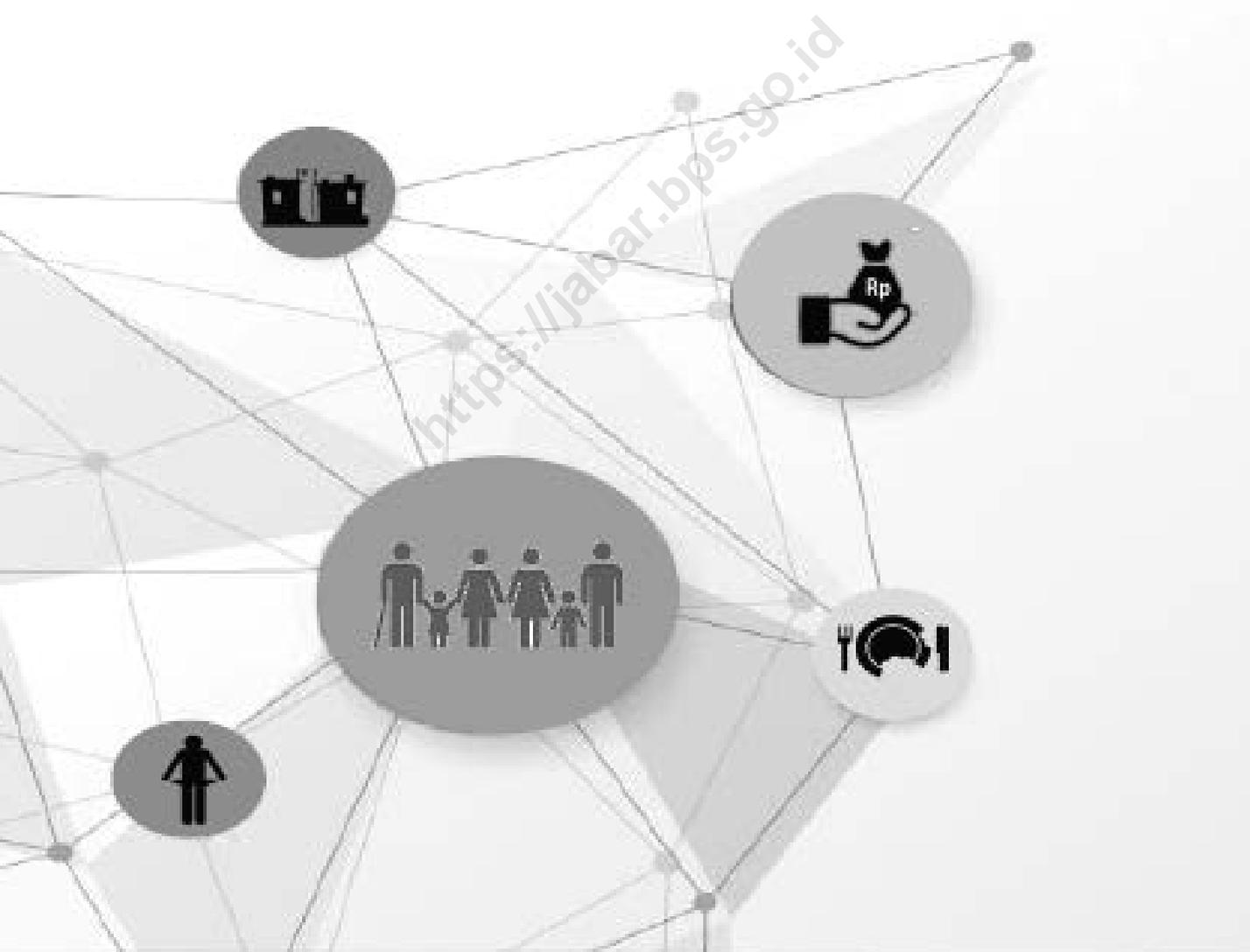


PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT Maret 2018



PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT Maret 2018



PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT MARET 2018

Katalog : 3205011.32
No. Publikasi : 32520.1807

Ukuran Buku : 18,2 cm x 24,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 19 halaman

Naskah:

Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit:

Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial
tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.*

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT MARET 2018

Tim Penyusun:

Penanggung Jawab Umum : Ir. Dody Herlando, M. Econ

Penanggung Jawab Teknis : Ir. R. Gandari Adianti Aju Fatimah, M.Si

Penulis dan Pengolah Data : Sulthan Hanifa Nefertiti, S.ST

Penyunting / Editor : Yayat Hidayat, S.ST, M.Stat.

Marisa Kusuma Putri, S.ST, M.Stat.

<https://jabar.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Salah satu permasalahan utama yang terjadi di Indonesia adalah kemiskinan. Untuk membuat suatu kebijakan yang tepat dalam rangka penanggulangan kemiskinan diperlukan suatu data kemiskinan yang menyeluruh.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat telah merilis tingkat kemiskinan makro provinsi sejak tahun 2007. Mulai tahun 2011, BPS Provinsi Jawa Barat merilis tingkat kemiskinan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu keadaan bulan Maret dan bulan September. Untuk melengkapi ulasan yang disajikan pada Berita Resmi Statistik (BRS), BPS Provinsi Jawa Barat menyusun laporan eksekutif yang mengupas lebih dalam data kemiskinan. Laporan eksekutif BRS kemiskinan keadaan Maret 2018, disajikan dalam bentuk publikasi "Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Maret 2018".

Diharapkan laporan ini dapat memberikan pemahaman tentang tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Semoga bermanfaat.

Bandung, Agustus 2018

Kepala,



Dody Herlando

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
I. Pendahuluan	1
II. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Maret 2017 – Maret 2018.....	3
III. Perubahan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Maret 2017 – Maret 2018	7
IV. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Barat Maret 2017 – Maret 2018	12
V. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Provinsi Jawa Barat Maret 2017 – Maret 2018.....	15
VI. Penutup	18
DAFTAR PUSTAKA.....	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat menurut Daerah, Maret 2017 – Maret 2018	3
Tabel 2. Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar pada Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Maret 2018	9

<https://jabar.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat menurut Klasifikasi Daerah, Maret 2017-Maret 2018.	4
Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi di Indonesia, Maret 2018.....	6
Gambar 3. Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat, Maret 2017-Maret 2018.....	7
Gambar 4. Garis Kemiskinan dan Peran Komoditi Makanan/Non Makanan Provinsi Jawa Barat, Maret 2018.....	8
Gambar 5. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Barat, Maret 2017 – Maret 2018.....	13
Gambar 6. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Barat, Maret 2017 – Maret 2018.....	14
Gambar 7. Perkembangan Gini Ratio Provinsi Jawa Barat menurut Klasifikasi Daerah, Maret 2017-Maret 2018.	15
Gambar 8. Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Jawa Barat, Maret 2018 (Persen).....	17

I. Pendahuluan

Salah satu poin kesepakatan dari seluruh bangsa di dunia yang tertuang dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan sampai pada pertengahan tahun 2015. Di berbagai negara, upaya untuk menekan angka kemiskinan juga masih belum menunjukkan capaian yang memuaskan. Hingga pada bulan September 2015, para pemimpin dunia menyepakati tujuan pembangunan global dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan kemiskinan masih merupakan salah satu poin penting yang ada dalam SDGs.

Kemiskinan sebagai salah satu poin untuk mengukur tingkat keberhasilan MDGs dan SDGS di suatu Negara. Namun, untuk mengukur kemiskinan diperlukan suatu konsep yang jelas. BPS sendiri memakai konsep kemiskinan yang dilihat dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan juga dipandang sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Suatu penduduk dikatakan merupakan penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan itu diwakili oleh 52 jenis komoditi yang meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain. Sedang Garis Kemiskinan Non Makanan

adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Sumber data utama dalam menghitung Garis Kemiskinan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Garis Kemiskinan yang dihasilkan hanya menggambarkan kondisi kemiskinan penduduk secara makro dikarenakan sumber data yang dipakai hanya berdasarkan survei. Kemiskinan makro tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana keberadaan penduduk miskin tersebut. Namun demikian, kemiskinan makro dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kemiskinan di suatu daerah. Data berkalaanya digunakan untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar waktu menurut wilayah sehingga pemerintah bisa menggunakan data tersebut sebagai dasar kebijakan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut.

Selama ini, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sudah gencar melakukan berbagai program untuk penanggulangan kemiskinan. Anggaran yang begitu besar pun digulirkan untuk program pengentasan kemiskinan. Namun, berbagai program penanggulangan kemiskinan akan tidak efektif saat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak pro dengan kemiskinan, misalnya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan kenaikan tarif dasar listrik. Kondisi seperti ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk Jawa Barat yang secara geografis dekat dengan ibukota negara Republik Indonesia.

II. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat (Maret 2017 – Maret 2018)

Perkembangan tingkat kemiskinan pada kurun waktu bulan Maret 2017 – Maret 2018 di Jawa Barat menunjukkan tren menurun. Pada keadaan Maret 2017, persentase penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 8,71 persen (4,17 juta jiwa). Dan pada keadaan September 2017 mengalami penurunan sebesar 0,88 persen menjadi 7,83 persen (3,77 juta jiwa). Penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi selama kurun waktu September 2017 – Maret 2018 ini diiringi pula dengan kondisi perekonomian penduduk Jawa Barat mengalami perubahan ke arah positif.

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Barat menurut Daerah, Maret 2017 – Maret 2018

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2017	2,59	7,52
September 2017	2,39	6,76
Maret 2018	2,33	6,47
Perdesaan		
Maret 2017	1,58	11,75
September 2017	1,38	10,77
Maret 2018	1,29	10,25
Perkotaan+Perdesaan		
Maret 2017	4,17	8,71
September 2017	3,77	7,83
Maret 2018	3,62	7,45

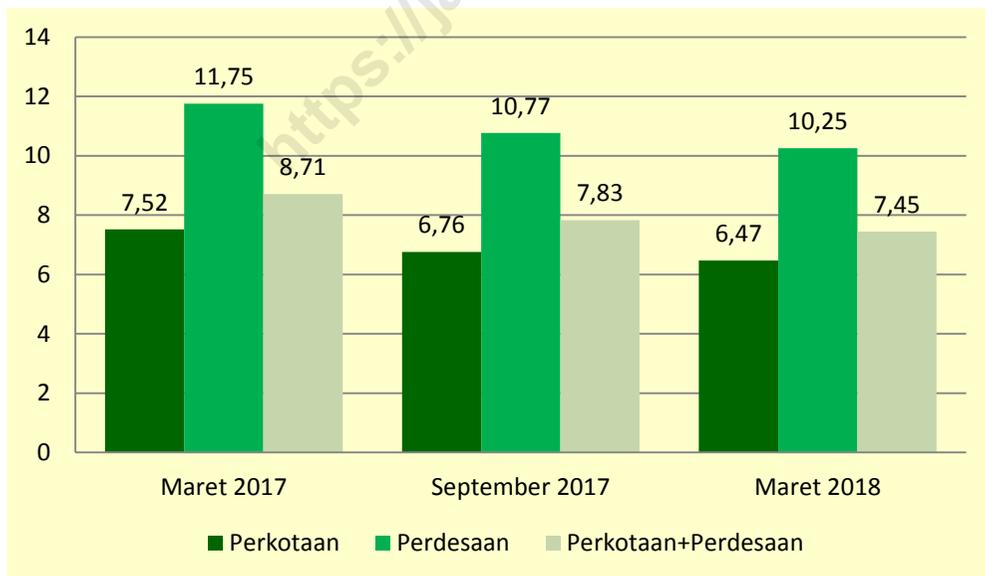
Sumber : Data Susenas 2017-2018

Kemudian pada Maret 2018, persentase penduduk miskin di Jawa Barat kembali mengalami penurunan sebesar 0,38 persen dibandingkan keadaan September 2017. Jika dilihat selama kurun waktu Maret 2017 -

Maret 2018, persentase penduduk miskin Jawa Barat mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 1,26 persen. Hal ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dalam arti pemerintah telah berhasil dalam program pengentasan kemiskinan selama periode Maret 2017 – Maret 2018.

Secara absolut dalam kurun waktu setahun terakhir selama periode Maret 2017 – Maret 2018, penduduk miskin Jawa Barat terjadi penurunan sekitar 550 ribu jiwa yaitu dari 4,17 juta jiwa menjadi 3,62 juta jiwa. Penurunan ini terjadi baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Di daerah perdesaan jumlah penduduk miskin berkurang 290 ribu jiwa (dari 1,58 juta jiwa menjadi 1,29 juta jiwa). Hal yang sama terjadi juga di perkotaan dimana secara absolut mengalami penurunan sebanyak 260 ribu jiwa (dari 2,59 juta jiwa menjadi 2,33 juta jiwa).

Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat menurut Klasifikasi Daerah, Maret 2017 – Maret 2018



Sumber : Data Susenas 2017-2018

Jika dilihat dari persentase, selama periode Maret 2017 – Maret 2018, penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan turun sebesar

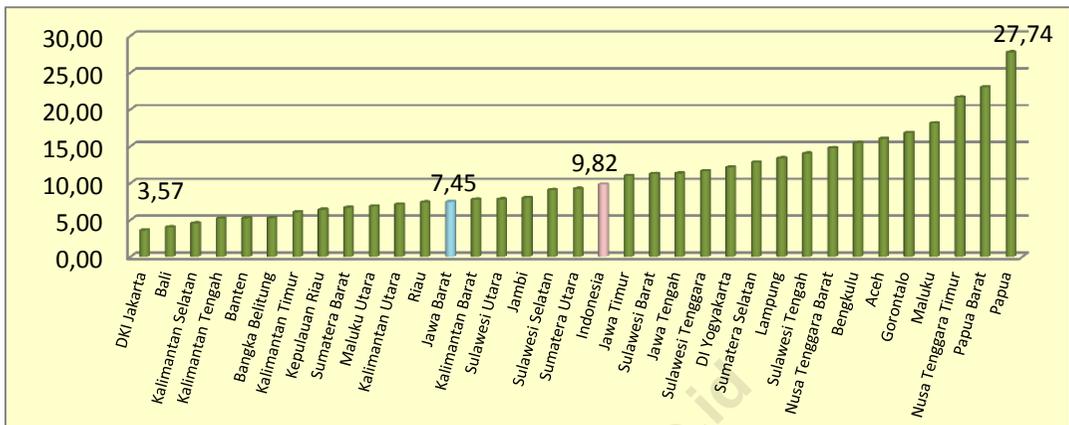
1,50 persen (11,75 persen menjadi 10,25 persen). Begitu juga di daerah perkotaan turun sebesar 1,05 persen (dari 7,52 persen menjadi 6,47 persen). Untuk periode September 2017 – Maret 2018, penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan 0,52 persen (dari 10,77 persen menjadi 10,25 persen) dan di perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,29 persen yaitu dari 6,76 persen menjadi 6,47 persen (Gambar 1).

Secara umum, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan lebih besar dari pada perkotaan. Salah satu penyebabnya dikarenakan akses dan infrastruktur di daerah perdesaan yang belum memadai yang menghambat penduduk untuk mendapatkan informasi dan pelayanan umum baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun yang lainnya. Selain itu, bisa dimungkinkan karena kualitas sumber daya manusia di perdesaan masih lebih rendah dibandingkan perkotaan.

Dari gambaran kondisi ini, pemerintah masih punya pekerjaan rumah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pemerintah harus bisa mengendalikan stabilitas harga, khususnya harga kebutuhan pokok sehingga kemampuan daya beli masyarakat bisa tetap terjaga.

Jika dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin Indonesia, posisi Jawa Barat pada Maret 2018 lebih kecil dari angka nasional. Jika dilihat dari persentase penduduk miskin yang terkecil, maka Provinsi Jawa Barat menempati urutan ke-13. Adapun persentase penduduk miskin yang terendah di Indonesia ditempati Provinsi DKI Jakarta dengan angka 3,57 persen dan yang terbesar yaitu Provinsi Papua dengan 27,74 persen. Jika dilihat dari provinsi yang ada di Pulau Jawa, persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat menempati posisi ketiga terkecil setelah DKI Jakarta dan Banten (Gambar 2).

Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia, Maret 2018



Sumber : Data Susenas Maret 2018

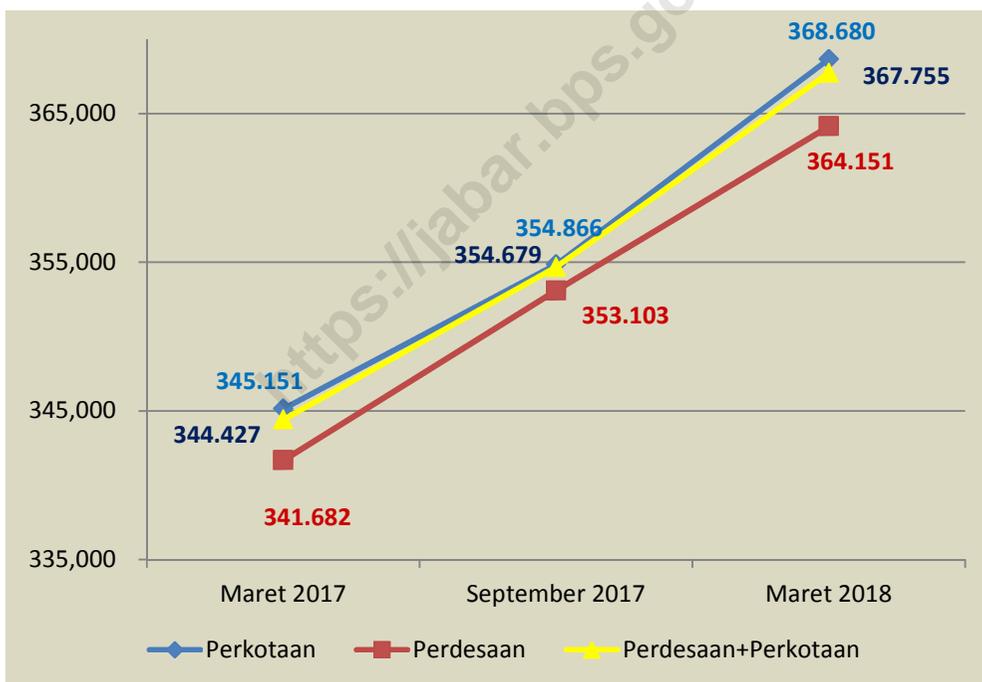
Penurunan persentase kemiskinan pada kurun waktu September 2017 – Maret 2018 (0,38 persen) patut diduga bahwa program pemerintah di bidang ekonomi cukup berhasil dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Barat. Hal ini digambarkan dari data makro ekonomi yang mendukung penurunan persentase penduduk miskin, diantaranya :

1. Laju pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2018 yang tumbuh sebesar 6,02 persen
2. Nilai Tukar Petani (NTP) pada kondisi Maret 2018 yang mengalami kenaikan sebesar 2,28 poin dibandingkan kondisi September 2017 yaitu dari 105,98 menjadi 108,26.
3. Berdasarkan hasil SAKERNAS, rata-rata upah riil buruh konstruksi, transportasi, perdagangan, dan penyediaan makan dan minum pada kondisi Februari 2018 mengalami kenaikan.
4. Walaupun secara tidak langsung, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga diduga berpengaruh pada turunnya angka kemiskinan di Jawa Barat. TPT di Jawa Barat mengalami penurunan dari 8,22 persen pada Agustus 2017 menjadi 8,16 persen pada Februari 2018 atau turun sebesar 0,06 persen.

III. Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2016 – Maret 2017

Dalam proses penghitungan, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Batasan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Selama kurun waktu setahun dari Maret 2017 - 2018, Garis Kemiskinan naik dari Rp. 344.427,- pada Maret 2017 menjadi Rp. 367.755,- pada Maret 2018.

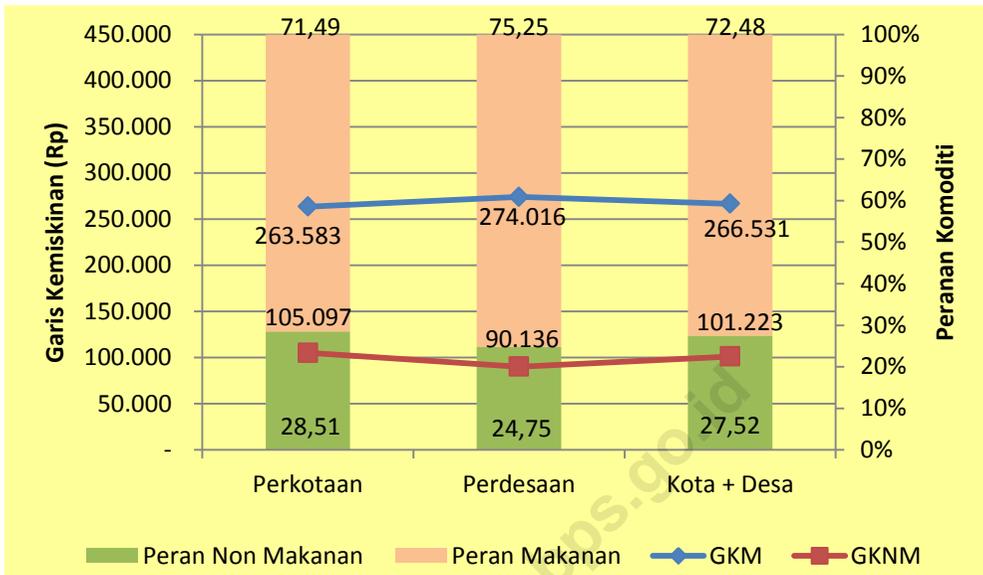
Gambar 3. Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat, Maret 2017-Maret 2018



Sumber : Data Susenas 2017-2018

Apabila dilihat berdasarkan klasifikasi daerah, Garis Kemiskinan perkotaan kenaikannya lebih tinggi yaitu dari Rp. 345.151,- pada Maret 2017 menjadi Rp. 368.680,- pada Maret 2018. Sedangkan Garis Kemiskinan perdesaan mengalami kenaikan dari Rp 341.682,- di Maret 2017 menjadi Rp. 364.151,- pada Maret 2018 (Gambar 3).

Gambar 4. Garis Kemiskinan dan Peran Komoditi Makanan/Non Makanan Provinsi Jawa Barat, Maret 2018



Sumber: Data Susenas Maret 2018

Garis Kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Pada Maret 2018, secara total Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 266.531,- per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan Non Makanan sebesar Rp 101.223,- per kapita per bulan. Jika dibedakan antara perkotaan dan perdesaan, Garis Kemiskinan Makanan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan Garis Kemiskinan Makanan di perkotaan yaitu Rp. 274.016,- per kapita per bulan dibanding Rp 263.583,- per kapita per bulan. Tetapi sebaliknya, untuk Garis Kemiskinan Non Makanan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yaitu mencapai 105.097,- per kapita per bulan di perkotaan sedangkan di perdesaan mencapai Rp. 90.136,- per kapita per bulan (Gambar 4).

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan sangat dominan dibandingkan peran komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat pada tingkat ekonomi rendah lebih didominasi

pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan kebutuhan bukan makanan. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan sebesar 71,49 persen di perkotaan dan 75,25 di perdesaan. Secara total peranan komoditi makanan terhadap GK sebesar 72,48 persen.

Untuk membandingkan angka kemiskinan antar negara, Bank Dunia menghitung Garis Kemiskinan dengan menggunakan estimasi konsumsi yang dikonversikan ke dalam US\$ PPP (*Purchasing Power Parity* atau paritas daya beli), bukan nilai tukar US\$ resmi. Angka konversi PPP ini menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa di mana jumlah yang sama tersebut dapat dibeli seharga US\$ 1 di Amerika. Untuk negara *lower middle income* Bank Dunia menetapkan dua batasan kemiskinan internasional yaitu 1,90 US\$ PPP per kapita per hari sebagai batas *extreme poverty* dan 3,20 US\$ PPP per kapita per hari sebagai batas *poverty*.

Tabel 2. Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar pada Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat, Maret 2018

Komoditi	Perkotaan (%)	Komoditi	Perdesaan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	71,49	Makanan	75,25
Beras	23,82	Beras	31,70
Rokok kretek filter	12,38	Rokok kretek filter	8,20
Telur ayam ras	4,38	Telur ayam ras	3,76
Daging ayam ras	4,07	Daging ayam ras	3,24
Mie instan	2,93	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	3,01
Bukan Makanan	28,51	Bukan Makanan	24,75
Perumahan	8,72	Perumahan	8,89
Bensin	4,28	Bensin	2,78
Listrik	3,85	Listrik	2,26
Pendidikan	1,74	Perlengkapan mandi	1,17
Angkutan	1,30	Pendidikan	1,09
Lainnya	8,61	Lainnya	8,56

Sumber : Data Susenas 2018

Jika dilihat pada komoditi yang menjadi penyumbang terbesar Garis Kemiskinan pada Maret 2018 baik itu di daerah perkotaan maupun di perdesaan, beras menjadi komoditi dengan urutan pertama. Di perkotaan, beras mencapai angka 23,82 persen sedang di perdesaan bisa mencapai 31,70 persen. Hal ini dikarenakan makanan utama dari sebagian besar penduduk Indonesia adalah beras, sehingga menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas harga beras.

Posisi kedua terbesar sebagai penyumbang Garis Kemiskinan adalah rokok kretek filter. Kondisi ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Sebenarnya kalau dilihat makanan yang menghasilkan kalori, rokok kretek tidak termasuk dalam hal ini. Namun karena rokok kretek ini banyak dikonsumsi oleh penduduk miskin sehingga tetap dimasukkan dalam penghitungan Garis Kemiskinan. Komoditi rokok kretek filter memberikan sumbangan sebesar 12,38 persen untuk daerah perkotaan dan 8,20 persen di perdesaan.

Untuk komoditi selanjutnya, telur ayam ras dan daging ayam ras menempati posisi ketiga dan keempat sebagai penyumbang Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Komoditi telur ayam ras memberikan sumbangan sebesar 4,38 persen untuk daerah perkotaan dan 3,76 persen untuk daerah perdesaan. Sedangkan daging ayam ras memberikan sumbangan sebesar 4,07 persen di daerah perkotaan dan 3,24 persen di perdesaan. Untuk posisi kelima terdapat perbedaan antara perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, mie instan menempati urutan kelima dengan 2,93 persen menyumbang Garis Kemiskinan. Sedangkan di perdesaan, komoditi yang berada di urutan kelima penyumbang Garis Kemiskinan adalah kopi bubuk dan kopi instan (*sachet*) sebesar 3,01 persen.

Untuk komoditi bukan makanan lima besar yang memberi sumbangan untuk Garis Kemiskinan di daerah perkotaan adalah perumahan yaitu sebesar 8,72 persen, bensin 4,28 persen, listrik 3,85 persen, pendidikan 1,74 persen dan angkutan sebesar 1,30 persen. Sedangkan lima komoditi bukan makanan penyumbang terbesar terhadap Garis Kemiskinan di daerah perdesaan secara berturut – turut adalah perumahan yaitu sebesar 8,89 persen, bensin sebesar 2,78 persen, listrik sebesar 2,26 persen, perlengkapan mandi sebesar 1,17 persen dan pendidikan sebesar 1,09 persen.

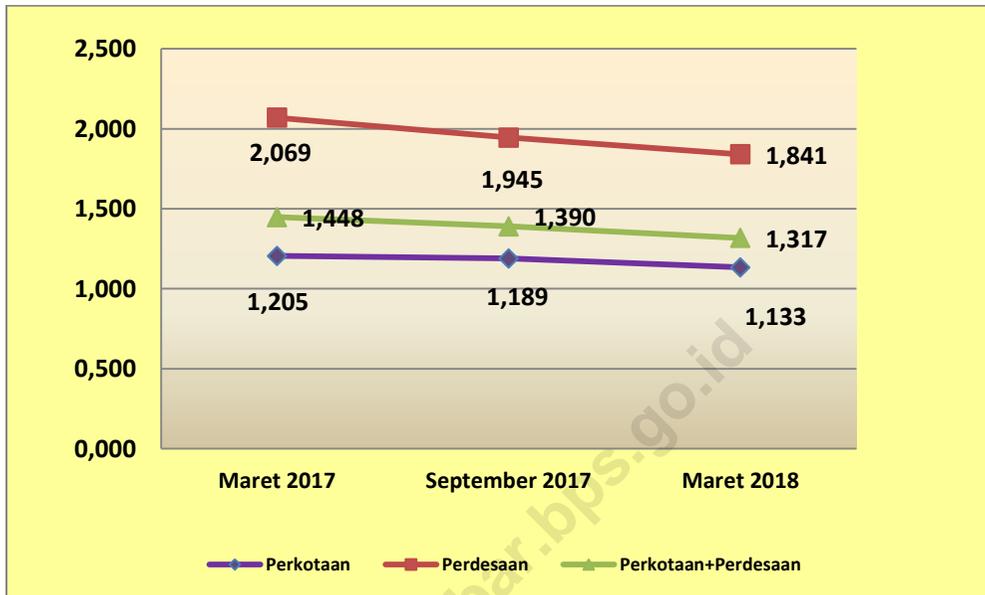
<https://jabar.bps.go.id>

IV. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Menurut Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirus) Badan Pusat Statistik (BPS), nilai dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) ini dapat digunakan untuk menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1), semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Sedang Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar 5. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Barat Maret 2017-Maret 2018

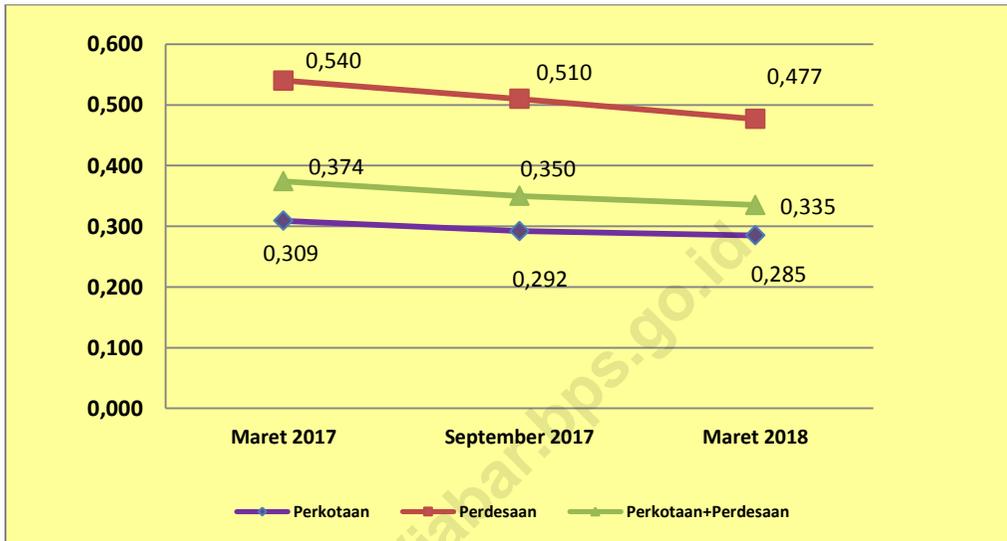


Sumber : Data Susenas 2017-2018

Pada periode Maret 2017 – Maret 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Jawa Barat menunjukkan penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,448 pada keadaan Maret 2017 menjadi 1,317 pada keadaan Maret 2018. Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati dari garis kemiskinan. Jika dilihat menurut wilayah, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan baik di perkotaan maupun perdesaan. Untuk wilayah perdesaan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan dari 2,069 pada bulan Maret 2017 menjadi 1,841 pada bulan Maret 2018. Begitu pula di wilayah perkotaan turun dari 1,205 pada Maret 2017 menjadi 1,133 pada Maret 2017 (Gambar 6). Apabila dilihat secara keseluruhan, Indeks Kedalaman Kemiskinan di perkotaan lebih

rendah dibandingkan dengan di perdesaan. Ini bisa menjelaskan bahwa kondisi kemiskinan di daerah perkotaan lebih baik daripada di perdesaan.

Gambar 6. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Barat Maret 2017 – Maret 2018



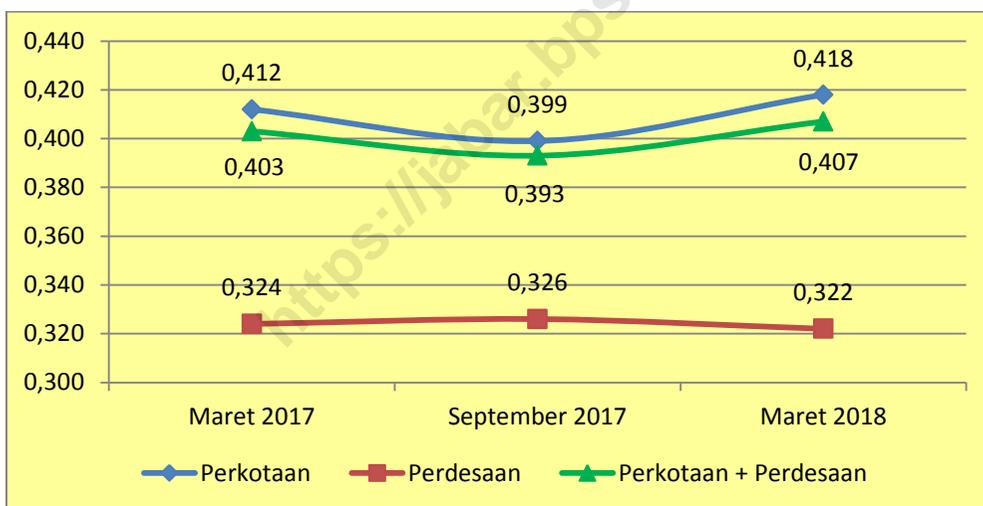
Sumber : Data Susenas 2017-2018

Dari hasil Susenas Maret 2018, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Barat mencapai 0,335. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 0,015 poin dibandingkan pada September 2017 (0,350). Ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin cenderung semakin menyempit. Pada kurun waktu yang sama, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di wilayah perkotaan turun dari 0,292 menjadi 0,285. Hal yang sama juga terjadi di perdesaan, turun dari 0,510 menjadi 0,477 (Gambar 7).

V. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, Maret 2017 – Maret 2018

Salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat adalah distribusi pendapatan penduduk. Karena data mengenai pendapatan sulit diperoleh, maka pengukuran distribusi pendapatan selama ini menggunakan pendekatan data pengeluaran. Banyak ukuran yang bisa digunakan untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan, salah satunya dengan Gini Ratio. Nilai Gini Ratio ini berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio maka semakin tinggi pula ketimpangannya.

Gambar 7. Perkembangan Gini Ratio Provinsi Jawa Barat menurut Klasifikasi Daerah, Maret 2017 – Maret 2018



Sumber : Data Susenas 2017-2018

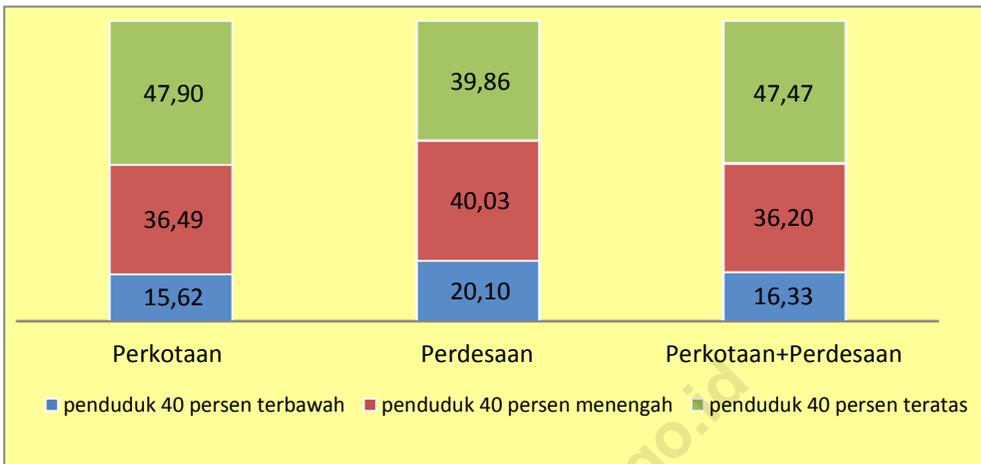
Perkembangan nilai Gini Ratio Provinsi Jawa Barat periode Maret 2017 – 2018 mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk Jawa Barat semakin tinggi. Pada Maret 2017, nilai Gini Ratio Provinsi Jawa Barat sebesar 0,403 dan menurun pada September 2017 menjadi 0,393. Kemudian pada bulan Maret 2018, nilai Gini Ratio

mengalami kenaikan dibandingkan September 2017 yaitu menjadi sebesar 0,407.

Jika dilihat berdasarkan klasifikasi wilayah, dalam kurun waktu Maret 2017 – 2018, daerah perkotaan angka Gini Ratio cenderung berfluktuatif dari 0,412 pada bulan Maret 2017 turun ke 0,399 di September 2017 kemudian naik menjadi 0,418 pada Maret 2018. Sama halnya dengan di perkotaan, Gini Ratio wilayah pedesaan juga cenderung berfluktuatif angkanya. Pada Maret 2017, nilai Gini Ratio di pedesaan sebesar 0,324 naik menjadi 0,326 pada September 2017 dan kemudian turun menjadi 0,322 pada bulan Maret 2018.

Selain menggunakan Gini Ratio, salah satu ukuran yang bisa digunakan untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah itu nilainya ada di bawah 12 persen, kemudian ketimpangan sedang jika nilainya berkisar antara 12-17 persen serta ketimpangan rendah jika nilainya berada di atas 17 persen.

Gambar 8. Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Jawa Barat, Maret 2018 (Persen)



Sumber : Data Susenas Maret 2018

Pada Maret 2018, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di Jawa Barat adalah sebesar 16,33 persen yang berarti Jawa Barat berada pada kategori ketimpangan sedang bahkan hampir mendekati kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada Maret 2018 ini menurun jika dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 16,86 persen.

Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari Gini Ratio, ukuran ketimpangan Bank Dunia pun menyimpulkan hal yang sama yaitu ketimpangan daerah perkotaan di Jawa Barat ada pada kategori sedang dan di perdesaan ada pada kategori rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan Jawa Barat pada Maret 2018 adalah 15,62 persen. Sementara itu, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan pada Maret 2018 adalah sebesar 20,10 persen.

VI. Penutup

Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Jawa Barat sebesar 3,616 juta jiwa (7,45 persen). Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 0,38 persen jika dibandingkan keadaan bulan September 2017 dan menurun 1,26 persen jika dibandingkan Maret 2017.

Garis kemiskinan (GK) Jawa Barat pada bulan Maret 2018 sebesar Rp. 367.755,- per kapita per bulan. Ini mengalami peningkatan sebesar 3,69 persen jika dibandingkan dengan kondisi September 2017 dan 6,73 persen jika dibandingkan kondisi Maret 2017. Pada Maret 2018, peran komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan masih mendominasi dibandingkan komoditi bukan makanan. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan sebesar 72,48 persen.

Pada periode Maret 2017-Maret 2018, perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Keparahan kemiskinan (P2) di Jawa Barat sangat fluktuatif. Pada Maret 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Jawa Barat mencapai angka 1,317. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi September 2017 yaitu 1,390. Hal ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Jawa Barat pada Maret 2018 cenderung mendekati garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2), pada periode Maret 2018 mencapai nilai 0,335 dimana sedikit lebih rendah dibandingkan kondisi September 2017 yaitu 0,350. Penurunan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada Maret 2018 ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin di Jawa Barat cenderung menyempit.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 2017. Berita Resmi Statistik No. 38/07/32/Th.XX, 16 Juli 2018, Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Badan Pusat Statistik, 2017. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Jawa Barat, September 2017, Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

<https://jabar.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan PHH. Mustafa No. 43, Bandung
Telp. (022) 7272595 - 7201696
<http://www.jabar.bps.go.id>